

## Peran dan Tanggungjawab Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam

**M.Yunus Abu Bakar**

*elyunusy@uinsa.ac.id*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

**Siti Nur Maulidiyah Munandari**

*Nurmaulidiyah020504@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

**Zainia Zein**

*ZainiaZein20@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

*Korespondensi penulis: elyunusy@uinsa.ac.id*

**Abstract.** *Islamic education plays an important role in shaping the character and morals of individuals and society as a whole. The success of Islamic education does not only depend on educational institutions alone, but also involves the participation and responsibility of the community and government. Society, as the students' closest environment, has an obligation to create an atmosphere that is conducive to the development of Islamic education. This can be realized through active participation in supervising, providing support, and participating in activities related to Islamic education. On the other hand, the government plays a role as a regulator and facilitator in developing Islamic education. The government is responsible for formulating policies, providing infrastructure, and providing adequate budget allocations to ensure optimal implementation of Islamic education. Harmonious collaboration between society and government in carrying out their respective roles and responsibilities will create a strong and sustainable Islamic education ecosystem. This abstract provides a general overview of the roles and responsibilities of society and government in Islamic education. The community plays a role in creating a supportive environment, while the government is responsible for providing regulations and supporting facilities for the optimal implementation of Islamic education*

**Keywords:** *The role of society and government, responsibility of society and government, Islamic education*

**Abstrak.** Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan moral individu serta masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan semata, tetapi juga melibatkan peran serta dan tanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah. Masyarakat, sebagai lingkungan terdekat peserta didik, memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan pendidikan Islam. Hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam mengawasi, memberikan dukungan, dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Di sisi lain, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan terlaksananya pendidikan Islam dengan optimal. Kolaborasi yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing akan menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang kuat dan berkelanjutan. Abstrak ini memberikan gambaran umum tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, sementara pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi dan fasilitas pendukung bagi terlaksananya pendidikan Islam secara optimal

**Kata kunci:** Peran masyarakat dan pemerintah, tanggungjawab masyarakat dan pemerintah, pendidikan islam

---

*Received Mei 30, 2024; Revised Juni 10, 2024; Juli 01, 2024*

*\* Yunus Abu Bakar, elyunusy@uinsa.ac.id*

## **LATAR BELAKANG**

Hakikatnya, pendidikan Islam bertujuan untuk membangun dan memajukan potensi manusia. Potensi tersebut meliputi potensi jasmani dan rohani seperti akal, emosi, kemauan, dan masih banyak potensi yang lain. Sepanjang sejarah, pendidikan telah menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan manusia. Sejatinya pendidikan merupakan usaha manusia agar menjadi lebih baik, dan hakikat perubahan manusia adalah pergeseran nilai. (Asror, Bakar, and Fuad 2023) Menurut Armai Arif, Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, manusia berakhlak dan berakidah mampu mengakui eksistensi kekhilafahan Allah di muka bumi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.(Bakar 2015). Dalam bentuknya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya kolaboratif di antara orang-orang, atau bahkan upaya manusia di struktur sosial yang menawarkan layanan pendidikan .(Mappasiara 2018) Dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan, praktik mengajar melibatkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi melalui stimulus dan respon antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. .(Amin and Bakar 2021). Namun tidak hanya guru saja yang berperan dalam proses pembelajaran melainkan keluarga, masyarakat dan juga pemerintah harus ikut berperan aktif terhadap pendidikan islam yang di terapkan di peserta didik demi terwujudnya peserta didik yang berkualitas bagi negara dan bangsa.

Dalam proses ini, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang saling terkait untuk memastikan keberhasilan pendidikan Islam. Berikut ini adalah pendahuluan tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran atau metode lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.(Montolalu 2015) Guru-guru di Indonesia perlu berkolaborasi dengan masyarakat umum untuk meningkatkan standar pendidikan .Mereka bertugas menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan menanamkan prinsip-prinsip Islam..(Temon Astawa 2017).

Masyarakat memiliki peran signifikan dalam pendidikan Islam. tugas mereka adalah membangun suasana yang mendukung pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Islam. mereka juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dianut. . namun, pemerintah berperan untuk menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan Islam. Tidak hanya masyarakat umum dan guru saja tapi pemerintah juga turut berpartisipasi dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab mengupayakan dan melaksanakan satu sistem pendidikan nasional bagi semua warga negara Indonesia. Kemampuan pemerintah untuk menjamin pemerataan dan meningkatkan standar pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan yang

dipermasalahan, Khususnya bagi para pemuda dan generasi penerus bangsa, termasuk para pelajar dan remaja lainnya.(NURJANAHI14)

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Karena itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan pendidikan Islam secara efektif dan berkelanjutan. Pancasila merupakan landasan falsafah nasional Indonesia. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penerapan Pasal 17(3) di Bidang Pendidikan, pendidikan diharapkan dapat melatih para pelajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi manusia yang berakidah, berbudi luhur, dan terpadang. Kompeten, mahir, realistik, inovatif, inventif, realistik, suka rela, berani, toleran, sensitif secara sosial, penentu mayoritas, amanah. Kedua dasar hukum ini memperjelas bahwa pendidikan merupakan landasan atau lokus pengembangan pribadi.(Bakar et al. 2023) Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian pendidikan islam, masyarakat dan pemerintah dan juga apa peran dan bagaimana tanggungjawab masyarakat dalam pendidikan Islam, Kami juga akan membahas apa peran dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan islam.

Hakikatnya, pendidikan Islam bertujuan untuk membangun dan memajukan potensi manusia. Potensi tersebut meliputi potensi jasmani dan rohani seperti akal, emosi, kemauan, dan masih banyak potensi yang lainn. Sepanjang sejarah, pendidikan telah menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan manusia. Sejatinya pendidikan merupakan usaha manusia agar menjadi lebih baik, dan hakikat perubahan manusia adalah pergeseran nilai. (Asror, Bakar, and Fuad 2023) Menurut Armai Arif, Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, manusia berakhlak dan berakidah mampu mengakui eksistensi kekhalfahan Allah di muka bumi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.(Bakar 2015). Dalam bentuknya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya kolaboratif di antara orang-orang, atau bahkan upaya manusia di struktur sosial yang menawarkan layanan pendidikan .(Mappasiara 2018) Dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan, praktik mengajar melibatkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi melalui stimulus dan respon antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. .(Amin and Bakar 2021). Namun tidak hanya guru saja yang berperan dalam proses pembelajaran melainkan keluarga, masyarakat dan juga pemerintah harus ikut berperan aktif terhadap pendidikan islam yang di terapkan di peserta didik demi terwujudnya peserta didik yang berkualitas bagi negara dan bangsa.

Dalam proses ini, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang saling terkait untuk memastikan keberhasilan pendidikan Islam. Berikut ini adalah pendahuluan tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan

pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran atau metode lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.(Montolalu 2015) Guru-guru di Indonesia perlu berkolaborasi dengan masyarakat umum untuk meningkatkan standar pendidikan .Mereka bertugas menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan menanamkan prinsip-prinsip Islam.(Temon Astawa 2017).

Masyarakat memiliki peran signifikan dalam pendidikan Islam. tugas mereka adalah membangun suasana yang mendukung pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Islam. mereka juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dianut. namun, pemerintah berperan untuk menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan Islam. Tidak hanya masyarakat umum dan guru saja tapi pemerintah juga turut berpartisipasi dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab mengupayakan dan melaksanakan satu sistem pendidikan nasional bagi semua warga negara Indonesia. Kemampuan pemerintah untuk menjamin pemerataan dan meningkatkan standar pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan yang dipermasalahkan, Khususnya bagi para pemuda dan generasi penerus bangsa, termasuk para pelajar dan remaja lainnya.(NURJANA14)

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Karena itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan pendidikan Islam secara efektif dan berkelanjutan. Pancasila merupakan landasan falsafah nasional Indonesia. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penerapan Pasal 17(3) di Bidang Pendidikan, pendidikan diharapkan dapat melatih para pelajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi manusia yang berakidah, berbudi luhur, dan terpadang. Kompeten, mahir, realistik, inovatif, inventif, realistik, suka rela, berani, toleran, sensitif secara sosial, penentu mayoritas, amanah. Kedua dasar hukum ini memperjelas bahwa pendidikan merupakan landasan atau lokus pengembangan pribadi.(Bakar et al. 2023) Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian pendidikan islam, masyarakat dan pemerintah dan juga apa peran dan bagaimana tanggungjawab masyarakat dalam pendidikan Islam, Kami juga akan membahas apa peran dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Meta – Analisis, yaitu metode penelitian yang menganalisis hasil dari berbagai studi yang menggabungkan hasil dari beberapa macam studi ilmiah.(Asiah 2023) Peneliti mengamati beberapa jurnal, buku dan website peran masyarakat dan pemerintah serta tanggung jawab masyarakat dan pemerintah terhadap

pendidikan lalu menggabungkannya dan menjadikannya sebuah jurnal ilmiah.(Jawab and Terhadap 2021)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik dokumentasi untuk mencari tahu data-data penelitian dan dokumen yang terkait perihal tema penelitian. Dalam melakukan penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu dengan mengumpulkan data yang jelas dan berkaitan dengan tema, kemudian melakukan reduksi kata dan membenarkan kebakasaannya kemudian melakukan verifikasi data. Dari empat tahapan yang dilakukan penulis diharapkan bisa menjadi tulisan yang bermanfaat bagi para pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian pendidikan islam,masyarakat dan pemerintah**

Ilmu pendidikan islam adalah ilmu yang berisi teori berdasarkan ajaran islam. Akan tetapi, isi ilmu disini tidak hanya kumpulan teori melainkan penjelasan tentang teori itu serta ada juga data yang mendukung penjelasan tersebut agar lebih mudah dipahami. Secara psikologis, kata tersebut merujuk pada proses pencapaian nilai-nilai moral, dimana subjek dan objek selalu menyiratkan perbuatan yang patut dan sikap maksiat dihindari. Pendidikan Islam mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti:

1. Muhammad Fadil Al Jamali. Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang memperkaya manusia sesuai dengan kecakapan dasar (fitrah) dan kemampuan pendidikannya.
2. Umar Mohammad Al Toumi. Pendidikan Islam merupakan upaya mengubah tingkah laku baik individu maupun masyarakat dalam kehidupannya serta berinteraksi dengan alam lingkungannya melalui proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
3. Muhammad Munir Mursi. Karena Islam adalah agama fitrah, maka pendidikan Islam adalah pendidikan kemanusiaan, oleh karena itu segala larangan dan ketaatannya mengarah pada ilmu fitrah tersebut.

Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, melalui proses intelektual dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam, sesuai hakikatnya, baik potensi fundamentalnya maupun ajarannya membimbing seseorang untuk mengembangkan potensinya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Abdul Razak 2012)

Pengertian masyarakat telah didefinisikan oleh berbagai ahli dan sumber, tetapi secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan memiliki tujuan yang sama. Dalam definisi masyarakat, beberapa ahli telah memberikan kontribusi yang berbeda-beda. Dalam sintesis, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, memiliki tujuan yang sama, dan memiliki kebudayaan yang mereka

anggap sama. Mereka berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama, serta memiliki ciri-ciri seperti adanya system status, nilai-nilai dan norma-norma, serta peranan-peranan sosial yang mempertahankan kehidupan kelompoknya.(Nuzulia 1967)

Adapun pengertian mengenai pemerintah dapat dilihat dari berbagai aspek dan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan sumber. Berikut adalah beberapa definisi yang terkait dengan pengertian pemerintah:

1. Pengertian pemerintahan dalam arti luas: Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua organ negara yang ditunjuk dalam konstitusi negara sebagai pemegang kekuasaan negara. Ini termasuk badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif negara tersebut.
2. Pengertian pemerintahan dalam konsep pemerintahan daerah\*: Pemerintahan dalam konsep pemerintahan daerah dikenal di negara-negara yang secara konstitusional menerapkan prinsip dekosentrasi dan desentralisasi, seperti Indonesia. Di bawah naungan perundang-undangan.
3. Pengertian Pemerintah pada rancangan Pemerintahan Dalam Negeri\*: Pemerintah dalam rancangan pemerintahan dalam negeri bermula dari tradisi pemerintahan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pemerintah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya yang dianut.

Dalam sintesis, pengertian pemerintah dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk definisi yang dikemukakan oleh ahli dan sumber. Pemerintah dapat dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan, memiliki struktur dan fungsi yang spesifik, dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan negara.(Figueiró 1967)

Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Hubungan masyarakat dan pemerintah berfungsi sebagai unsur yang saling terkait dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Dalam hal ini, hubungan masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam membangun citra positif lembaga pendidikan Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dalam hubungan masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Salah satu strategi adalah dengan meningkatkan komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam dan membangun citra positif yang lebih baik.

Dalam hal ini, hubungan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sintesis, hubungan masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat

penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan meningkatkan komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat, serta bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, hubungan masyarakat dan pemerintah dapat membantu dalam membangun citra positif lembaga pendidikan Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. (Sari, Fauzi, and ... 2021)

### **Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan islam**

Masyarakat dalam pendidikan Islam juga memiliki peran yang sangat signifikan. Masyarakat memiliki tanggung jawab utama untuk membentuk citra positif lembaga pendidikan Islam dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat juga memiliki peran sebagai sumber informasi dan dukungan bagi lembaga pendidikan Islam, serta membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kontribusi aktif dalam kegiatan pendidikan. (Habib et al. 2023) Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat dipahami sebagai sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah, dipersatukan oleh pengalaman yang sama, mempunyai seperangkat persamaan, mampu mengenali kesatuan itu dan bertindak bersama untuk mengatasi krisis kehidupan. Ketiga, masyarakat sebagai lingkungan dan sistem pendidikan mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan individu.

Dalam hal ini masyarakat memegang peranan penting dalam upaya berpartisipasi dalam memberikan pendidikan, menyediakan tenaga kerja, biaya, infrastruktur, serta dukungan dalam menyediakan kesempatan kerja. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat dalam mendukung inisiatif pemerintah sangat diharapkan Untuk membuat hidup masyarakat lebih cerdas. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga dalam konteks penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas yang sangat penting.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan terpenting kedua setelah keluarga, dan tidak kalah pentingnya dengan keluarga atau masyarakat. Menurut Quraish Shihab (1995: 173) Semua pakar pendidikan setuju bahwa sistem dan tujuan pendidikan suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Berdasarkan itulah pendidikan harus berkembang dan muncul dari masyarakat. Pendidikan yang seperti itu mampu untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan berdirinya negara adalah sebagai pembangunan pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pembangunan kehidupan .Masyarakatnya cerdas. (Jawab and Terhadap 2021)

Partisipasi masyarakat lokal untuk mendukung peningkatan pendidikan agama Islam berlandaskan tantangan yang mungkin di alami masyarakat, khususnya peran pendidikan agama

Islam dan peran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Formatnya adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan reorientasi pendidikan Islam khususnya pada keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari individu dalam masyarakat, dan mempunyai peranan strategis dalam masyarakat dengan memajukan pendidikan agama Islam. Tanggung jawab orang tua yang kedua sangat penting bagi kelangsungan pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan agama bagi seluruh keluarga, dan mempunyai implikasi yang sangat nyata terhadap peranannya dalam meningkatkan pendidikan agama dengan memberikan contoh yang baik dan sebagainya memberi.
2. Memperkuat masyarakat pembelajar Salah satu cara untuk memperkuat masyarakat pembelajar adalah melalui pengoperasian masjid, musala, langar, dan lembaga informal lainnya. Dalam konteks ini, tempat ibadah seperti masjid juga difungsikan sebagai tempat belajar komunal yang digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan Islam.
3. Partisipasi Aktif di Madrasah/Komite Sekolah Salah satu sarana untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan agama adalah dengan turut berperan aktif dalam komite sekolah/madarasah, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU tersebut sebuah peran. Sistem Peraturan Pendidikan Nasional No. Diumumkan pada tanggal 20 April 2003 bahwa masyarakat lokal juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan.
4. Mempromosikan serta mendukung semua program pendidikan agama di madrasah/sekolah. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan agama mencakup segala upaya yang dilakukan oleh sekolah/madarasah yang berhubungan dengan pengembangan kualitas pendidikan agama
5. Pembentukan lembaga pendidikan agama yang berfokus pada kualitas Lembaga pendidikan agama secara umum masih dianggap sebagai lembaga.

### **Peran dan tanggungjawab pemerintah dalam pendidikan islam**

Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam pendidikan Islam, terutama dalam mengatur dan mengawasi jalannya pendidikan. Pemerintah juga berperan dalam memberikan bantuan dan dukungan keuangan serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, hubungan masyarakat dan pemerintah sangat esensial untuk membentuk citra positif lembaga pendidikan Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. (Habib et al. 2023) Namun pada tahun, setelah otonomi daerah, kekuasaan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Semua pengelolaan sekolah mulai dari SD hingga SMA menjadi kewajiban otoritas lokal. Sedangkan pendidikan madrasah dikelola oleh Kementerian Agama yang terdiri dari MI, MTs, dan MA. Pengendalian anggaran tetap menjadi



tugas utama Kementerian Agama Indonesia. berbeda dengan pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. belum termasuk lembaga vertikal yang biaya pendidikannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. (Asiah 2023)

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemerintah yang harus giat dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan, di antaranya dilakukan dengan mempromosikan kesejahteraan umum dan mencerahkan kehidupan negara. (Jawab and Terhadap 2021) Bahkan KH. Ahmad Dahlan mengaplikasikan pemikirannya sendiri tentang pendidikan Islam dan menerapkan pendidikan yang tidak hanya mencakup bahan ajar umum tetapi juga bahan ajar yang berkaitan dengan agama-agama. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan pendidikan Islam yang belum diketahui Belanda saat itu, namun dihadirkan. Oleh KH Ahmad Dahlan. (Bakar.M yunus Abu 2023)

Dukungan pemerintah terhadap pesantren semakin meningkat sejak terbitnya PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan mu'adalah pada Pesantren dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Ma'had Aly pada PMA Nomor 71 tahun 2015. Pondok Pesantren Mu'adalah merupakan satuan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh dan berada dalam lingkungan pondok pesantren. Unit Pendidikan Keagamaan Islam ini mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik pesantren. Pondok Pesantren Mu'adalah dengan Dirasa Islam berbasis kitab kuning atau bertingkat dan pola pendidikan terstruktur ini dapat dianggap setara dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan PMA Nomor dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2014, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan sendiri dan memenuhi persyaratan pengakuan Ijazah Ponpes Muira tanpa Ponpes diberi izin. lembaga pesantren harus mengikuti ujian dalam Kurikulum Standar Nasional. (Ghofarrozin and Janah 2019)

Kemudian pada era orde lama, pada saat itu seluruh sistem pendidikan memberikan peluang yang baik untuk berkembang lebih leluasa dan menjadi lebih terbuka dan bebas. Kemunculan madrasah-madrasah ini bukan berarti penghapusan ajaran Islam tradisional, namun justru akan melengkapi madrasah-madrasah tersebut. Selain terakreditasi, pesantren juga mendapat dukungan dari pemerintah berupa saran dan permohonan.

Pada masa Orde Baru, pada awalnya terdapat beberapa ketentuan terkait pesantren yang bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan kebijakan Orde Lama. Pada tingkat ini, belum terdapat pesantren yang masuk dalam sistem pendidikan nasional, namun juga lembaga pendidikan otonom yang berada di bawah kendali Kementerian Agama. Pada tahun 1990 an, peraturan pemerintah Orde Baru yang mengatur Madrasah berfokus pada pelaksanaan koordinasi

pendidikan nasional yang komprehensif. Awalnya Pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan agama, namun kini bisa diklaim sebagai sekolah negeri.

Oleh karena itu, pemerintah dapat membentuk masa depan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren sejalan dengan perkembangan zaman dengan mengambil peran sebagai agen perubahan tanpa menghilangkan tanggung jawab sosialnya, apalagi dalam perannya sebagai social engineer bisa beradaptasi.

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu bertujuan untuk melindungi kemandirian dan keistimewaan pendidikan pondok pesantren, mewujudkan pendidikan bermutu tinggi, dan menjamin terselenggaranya pendidikan pondok pesantren memajukan.

Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan pesantren Menurut peneliti, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan pesantren adalah dengan memberikan status hukum dan membedakannya dengan pendidikan formal yang memiliki ciri khas pesantren yang diakui dan setara, kata peneliti, pemerintah mempunyai peran dalam keberlanjutan pesantren. Bertanggung jawab untuk memoderasi, mengawasi, dan pengembangan masyarakat dalam kehidupan sekolah di Indonesia khususnya Jawa Timur. (Najah 2022)

Tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan harus menjadi komitmen yang dilaksanakan melalui penyediaan seluruh kebutuhan dasar sekolah, sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap siswa. Padahal, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut mempunyai tanggung jawab sesuai tugas dan kompetensinya masing-masing. (Lega and Hartanto 2023) Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin pendanaan bagi pendidikan seluruh warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun. Oleh karena itu, pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, dan paling tidak pendidikan dasar digratiskan karena wajib belajar merupakan tanggung jawab nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Sirait 2017)

## **KESIMPULAN**

Berikut adalah kesimpulan tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam:

1. Peran Masyarakat: Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan Islam, dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-

- kegiatan pendidikan Islam, seperti pengajian, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya.
2. Peran Pemerintah: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi pendidikan Islam, seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kesimpulannya, peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan Islam sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan Islam. Dengan kerjasama yang baik, pendidikan Islam akan dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Razak, Mohd Abbas. 2012. "Human Nature: An Islamic Perspective." *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN: 2289-8077) 8: 251–74.
- Amin, Ahmad Makinun, and M Yunus Abu Bakar. 2021. "Peran Pendidikan Dalam Kegiatan Entrepreneurship Santri Kidspreneur Al Madina Surabaya." *Ej* 4(1): 117–26.
- Asiah, Dede. 2023. "Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan." *Jurnal Pelita Nusantara* 1(1): 68–75.
- Asror, Moh, M Yunus Abu Bakar, and Ah Zakki Fuad. 2023. "Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus : Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5 . 0." 8(1).
- Bakar.M yunus Abu, Azzahra.Rahma Tiara. 2023. "Pemikiran Dan Implikasi Pendidikan Islam KH Ahmad Dahlan Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer." 10(1): 72–92.
- Bakar, M Yunus Abu, Ah Zakki Fuad, U I N Sunan, and Ampel Surabaya. 2023. "PENDIDIKAN ISLAM INTEGRATIF MUHAMMAD IQBAL Menguak Tabir Pendidikan Ideal Perpektif Pujangga Fenomenal Abstrak : Muhammad Iqbal Juga Dikenal Dengan Kegigihannya Mengembalikan Pengetahuan Serta Dengan Perkembangan Teknologi Modern . Karena Bagi Paling Terk." 08(02): 1–15.
- Figureiró, Adriano. 1967. "Pengertian Pemerintah." *Biogeografia*: 5–24.
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. 2019. "Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomer 18 Tahun 2019." *Islamic REview* 10(18): 1–18.
- Habib, Mustafa, Umi Masnah Sihombing, Utia Rahmadani, and Wirahayu Wirahayu. 2023. "Pentingnya Manajemen Humas Di Lembaga Pendidikan Islam." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2): 269–75.

- Jawab, Tanggung, and Pemerintah Terhadap. 2021. "(Journal Research and Education Studies)." 1(1): 84–90.
- Lega, Dianawati, and Hartanto. 2023. "Tanggungjawab Pemerintah Dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan." *Adil Indonesia Journal* 4(2): 54–67.
- Montolalu, Angger Angelino. 2015. "Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung Oleh : Angger Angelino Montolalu 2 ABSTRAK." *Jurnal Ilmu Politik* (1).
- Najah, Zuyinatun. 2022. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jawa Timur." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(2): 100–109.
- Nuzulia, Atina. 1967. "Pengertian Masyarakat Dan Pesantren." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Sari, N B E, M T A Fauzi, and ... 2021. "Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Dar El ...* 1(1): 1–20. [https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_dar-el-falah/article/download/31/26](https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_dar-el-falah/article/download/31/26).
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. 2017. "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Ilmu Hukum* 2(1): 158–82.
- Temon Astawa, I Nyoman. 2017. "Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3(2): 197.